

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Geografi adalah ilmu pengetahuan yang menceritakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam, dan penduduk serta mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. (Bintarto, 1977)

Sektor informal di Indonesia beberapa tahun ini terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan. Menurut para ahli, Indonesia yang termasuk negara berkembang yang dicirikan dengan laju pertumbuhan yang tinggi menyebabkan sektor formal tidak dapat menyerap angkatan kerja di kota. Apabila dilihat dari piramida penduduk Indonesia yang berbentuk *expansive* di mana angka kematian lebih rendah dibandingkan dengan jumlah kelahiran. Jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia menyebabkan laju mobilitas dari desa ke kota tinggi dan menyebabkan menjamurnya sektor informal di kota. Terjadi pengangguran terutama di kalangan penduduk usia muda dan terdidik dengan membengkaknya sektor informal di kota. (dalam Chriss Manning dan Tadjuddin Noer Effendi, 1995:87)

Sektor informal di daerah perkotaan memilih lokasi strategis yang banyak dilalui arus mobilitas masyarakat, hal ini menyebabkan mengurangi keindahan kota dan menjadi salah satu faktor kemacetan. Hal tersebut membuat pemerintah Kabupaten(PemKab) sebagai pemangku kebijakan di daerah melakukan penataan sektor informal tersebut, akan tetapi hal tersebut akan membatasi ruang gerak sektor informal di suatu daerah.

Penataan PKL selalu menimbulkan pro dan kontra, hal ini didasarkan pada lamanya para pedagang menempati tempat tersebut. Pemindehan lokasi berdagang dikhawatirkan akan menurunkan jumlah penghasilan yang akan didapat. PKL di alun- alun Sragen utamanya di sisi timur dan selatan kerab kali dipadati aktivitas jual beli, hal ini menyebabkan kemacetan. Meskipun

PKL memberi dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, relokasi harus tetap dilaksanakan. Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Sragen nomor 7 tahun 2014 BAB 1 Pasal 1 no 14 berbunyi : Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL di lahan fasilitas umum yang ditetapkan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan landasan tersebut PemKab Sragen merelokasi pedagang kaki lima di alun- alun Sragen. Serta pasal 1 no 17 yang berbunyi : Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan tersebut menjadi dasar pemindahan apabila di pandang melalui sudut pandang estetika lingkungan dan dampak kebersihan lingkungan yang disebabkan oleh keberadaan PKL di alun-alun.

Penataan PKL di Stadion Taruna ini sebagai ruang publik bagi warga Sragen. Jumlah PKL yang diboyong sebanyak 116 orang yang terdiri atas 92 orang PKL dari Peguyuban Ngupoyo Upo dan 24 orang dari Paguyuban Taruna Mulyo,” (Kepala Disperindag Sragen, Untung Sugihartono dalam : <https://rakyatjateng.fajar.co.id>)

Maksud PemKab Sragen memindahkan para PKL dari Alun-alun ke kompleks Stadion Taruna yakni menjadikan Alun-alun Sragen menjadi icon Kabupaten Sragen dan menjadi area ruang terbuka yang sedap dipandang. "Sebentar lagi tol sudah hampir jadi, apabila kita tidak bisa menjadi kota yang cantik dan mempercantik diri kita akan ditinggalkan orang yang melewati Sragen" (Kusdinar Untung Yuni Sukowati dalam <http://Sragenkab.go.id>)

Dampak sampah PKL menimbulkan berbagai macam masalah terhadap lingkungan. Sampah yang menumpuk dan tidak segera diangkut merupakan sumber bau tidak sedap yang memberikan efek buruk terhadap lingkungan sekitar, terlebih lagi Alun-alun Sragen berada di jalur utama. Pencemaran air dan tanah juga menjadi salah satu faktor yang mendasari

relokasi PKL. Sarana (tempat sampah) yang tersedia tidak mampu menampung banyaknya sampah akibat aktifitas PKL tersebut apabila terjadi hujan menyebabkan limbah masuk kedalam saluran tanah dan terjadi pencemaran. Gangguan estetika yang timbul apabila sampah yang disebabkan oleh sampah dilihat oleh para pengguna jalan dan orang-orang yang berekreasi di Alun-alun Sragen akan mengganggu kenyamanan, hal ini ditakutkan akan berpindah yang semulanya di Alun-alun Sragen berpindah di Stadion Taruna dan mengganggu estetika di Stadion Taruna.

Keberadaan PKL seringkali dikaitkan dengan kesan semrawut hal ini karena mereka menempati lahan-lahan kosong untuk berdagang. Keberadaan PKL seringkali juga mengganggu ketertiban umum di mana para pembeli yang datang memarkirkan kendaraannya di badan jalan. Kondisi ini akan menimbulkan kemacetan lalu lintas dan mengganggu aktivitas masyarakat yang ada di sekitar Stadion Taruna.

Merelokasi PKL ke tempat baru sering dilakukan oleh pemerintah namun, keputusan relokasi seringkali sepihak. Sehingga pendapatan PKL merosot dan menimbulkan permasalahan yang baru. Akibatnya PKL kembali ke tempat semula atau mencari lokasi lain yang lebih menjanjikan.

Pemindahan PKL dari Alun-alun ke Stadion Taruna ini diharapkan dapat berdampak positif bagi kedua belah pihak yaitu pedagang dan masyarakat yang ada di sekitar Stadion Taruna tersebut, namun tidak dapat dipungkiri dari adanya suatu kebijakan tersebut mungkin saja akan menimbulkan dampak negatif bagi pihak tertentu.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana kebijakan relokasi PKL tersebut berpengaruh terhadap pendapatan PKL dan berdampak seperti apa untuk masyarakat di sekitar Stadion Taruna. Sehingga penulis mengambil judul “**Analisis Dampak Relokasi PKL dari Alun-alun Sragen ke Stadion Taruna Sragen**”

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik Pedagang Kaki Lima di Stadion Taruna Sragen?
2. Apa dampak relokasi pedagang kaki lima Alun-alun Sragen ke Stadion Taruna bagi pendapatan PKL?
3. Apa dampak relokasi pedagang kaki lima Alun-alun Sragen ke Stadion Taruna bagi Masyarakat sekitar Stadion Taruna ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis karakteristik pedagang kaki lima di Stadion Taruna Sragen
2. Menganalisis dampak relokasi pedagang kaki lima Alun-alun Sragen ke Stadion Taruna bagi pendapatan PKL
3. Menganalisis dampak relokasi pedagang kaki lima Alun-alun Sragen ke Stadion Taruna bagi masyarakat sekitar Stadion Taruna

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) fakultas geografi Universitas Muhamammadiyah Surakarta
2. Sebagai bentuk tanggungjawab mahasiswa terhadap ilmu pengetahuan
3. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemerintah atau dinas sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan PKL di Kabupaten Sragen.

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

1.5.1 Telaah Pustaka

1.5.1.1. Pengertian Relokasi

Relokasi merupakan usaha yang dilakukan untuk memindahkan suatu obyek dari suatu tempat ke tempat lain yang dianggap lebih baik. Relokasi PKL merupakan kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam melakukan penataan, pengelolaan dan pembinaan PKL dengan

menyediakan tempat baru yang lebih baik, jadi tidak hanya sekedar penertiban. Mustafa (2008:23) menyatakan bahwa kebijakan pemerintah yang menertibkan tempat aktivitas atau kegiatan usaha dengan disertai biaya dan syarat-syarat administratif dapat dipandang sebagai pengakuan PKL sebagai profesi yang legal dan formal sebagaimana sektor formal pada umumnya.

1.5.1.2. Dampak Kebijakan

Menurut Thomas Dye dalam (Winarno:2016), Dampak kebijakan adalah semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan, baik yang langsung maupun yang akan datang, harus diukur dalam bentuk efek simbolis atau efek nyata. Output kebijakan adalah berbagai hal yang dilakukan pemerintah. Kegiatan ini diukur dengan standar tertentu. Angka yang terlihat hanya memberikan sedikit informasi mengenai outcome atau dampak kebijakan publik, karena untuk menentukan outcome kebijakan publik perlu diperhatikan perubahan yang terjadi dalam lingkungan atau sistem politik yang disebabkan oleh aksi politik.

1.5.1.3 Pengertian Kota

Kota adalah kesatuan jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen serta coraknya materialistis. Masyarakat kota terdiri atas penduduk asli daerah tersebut dan pendatang. Masyarakat kota merupakan suatu masyarakat yang heterogen, baik dalam hal mata pencaharian, agama, adat, dan kebudayaan. (Bintarto)

1.5.1.4. Pengertian Tata Ruang Kota

Tata Ruang Kota adalah suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan memperhatikan keunggulan komparatif di suatu wilayah, dan mengurangi kesenjangan pembangunan dengan mengurangi kawasan-kawasan yang miskin, kumuh dan tertinggal.

1.5.1.5 Pengertian Struktur Ruang

Struktur ruang merupakan bagian dari organisasi keruangan sebuah kota dan mencirikan penggunaan lahan tertentu di kota (Bourne, 1971). Struktur ruang mempresentasikan ragam aktivitas yang dilakukan oleh manusia di perkotaan, semakin kompleks struktur ruang mencirikan aktivitas yang semakin bervariasi dan dinamis. Struktur kota akan selalu berubah seiring dengan pertumbuhan kota secara sosial-ekonomi, dan membentuk suatu organisasi keruangan tertentu yang merupakan representasi penggunaan ruang oleh manusia (Schnore, 1971). Struktur terbentuk berdasarkan persebaran kegiatan secara spasial (Schnore, 1971).

1.5.1.6. Pengertian Sektor Informal

Sektor informal adalah merupakan unit-unit usaha tidak resmi berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa memiliki izin usaha dan atau izin lokasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor informal digambarkan suatu kegiatan usaha berskala kecil yang dikelola oleh individu-individu dengan tingkat kebebasan yang tinggi dalam mengatur cara bagaimana dan di mana usaha tersebut dijalankan.

1.5.1.7 Ciri Sektor Informal

Adapun ciri-ciri sektor informal menurut Urip Soewarno dan Hidayat(1979: 38), adalah sebagai berikut:

1. Aktivitas pada sektor ini tidak terorganisir secara baik karena timbulnya tidak melalui institusi yang ada pada perekonomian modern.
2. Karena kebijakan pemerintah tidak sampai pada sektor ini, maka sektor informal tidak memiliki hubungan langsung dengan pemerintah.

3. Pada umumnya setiap unit usaha tidak memiliki izin usaha dari pemerintah.
4. Pola kegiatan tidak teratur dengan baik dalam arti tempat dan jam kerja.
5. Unit usaha pada sektor ini mudah untuk masuk dan keluar dari sektor ke sektor lain.
6. Karena modal dan peralatan serta perputaran usaha relative kecil, maka skala operasi unit usaha ini kecil pula.
7. Teknologi yang digunakan termasuk kedalam teknologi yang sederhana.
8. Untuk mengelola usaha tidak diperlukan tingkat pendidikan tertentu, serta keahliannya didapat dari sistem pendidikan non formal dan pengalaman.
9. Unit usaha ini termasuk ke dalam one man enter prise atau kalau memiliki buruh, maka buruh berasal dari lingkungan keluarga atau disebut juga family enterprise.
10. Sumber dana untuk modal tetap atau modal kerja kebanyakan berasal dari tabungan sendiri dan dari sumber keuangan tidak resmi.
11. Hasil produksi dan jasa dari sektor ini terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat miskin dan kadang-kadang oleh golongan menengah.

1.5.1.8 Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima adalah orang-orang dengan modal relatif kecil/sedikit berusaha (produksi-penjualan barang-barang/jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu dalam masyarakat”. Usaha itu dilakukan pada tempat-tempat yang dianggap strategis informal

1.5.1.9 Karakteristik Ekonomi

Karakteristik adalah sesuatu hal yang menjadikan suatu benda memiliki sifat, ciri dan kekhasan yang menyebabkan benda tersebut berbeda dengan benda yang lain baik itu benda hidup maupun benda mati. Karakteristik Pedagang Kaki Lima adalah sesuatu yang memberikan corak / sifat / ciri / kekhasan yang membedakan antara pedagang kaki lima dengan pedagang lainnya jika ditinjau dari segi sosial-ekonomi. Karakteristik ekonomi pengusaha dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya :

1. Pendapatan

Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung mau pun tidak langsung (Suroto dalam Hestanto, 2000).

2. Pendidikan

Tingkat pendidikan akan berpengaruh dalam perolehan pendapatan. Dalam jenis pekerjaan yang sama tentu orang yang berpendidikan tinggi dapat segera menyelesaikan pekerjaannya karena mendapatkan ketrampilan dari ilmu yang di dapat berbeda dengan yang berpendidikan rendah yang akan cenderung menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki.

3. Pekerjaan

Sebuah kegiatan yang aktif dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kehidupannya.

3. Jumlah anggota keluarga

Total dari sebuah keluarga yang terdiri dari kepala keluarga dan anggotanya (istri, anak atau famili).

4. Jumlah tanggungan keluarga

Orang yang menjadi tanggungan dalam keluarga misalnya istri, anak, famili dan lain-lain yang berpengaruh terhadap status ekonomi suatu keluarga di mana dengan beban tanggungan keluarga yang banyak mengakibatkan tingkat kebutuhan menjadi meningkat pula, begitu juga sebaliknya.

1.5.2 Penelitian Sebelumnya

Agata Ika Febrilianawati (2010) dalam skripsinya “ Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki lima (PKL) di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta dapat disimpulkan sebagai Berikut :

1. Kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Ki Hajar Dewantara oleh Pemerintah Kota Surakarta ke Pasar Panggungrejo di belakang Kantor Kecamatan Jebres dapat dikatakan efektif karena berhasil dalam mencapai tujuan kebijakan relokasi PKL. Dimana tujuan relokasi PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara adalah menciptakan kawasan bebas PKL di sekitar Jalan Ki Hajar Dewantara serta menciptakan kawasan asri sehubungan dibangunnya Solo Techno Park. Hal itu nampak pada terlaksananya dengan cukup baik program Pembinaan, Penataan dan Penertiban PKL yang berdasarkan Perda No. 8 Tahun 1995 tentang penataan Pedagang Kaki Lima, di mana program tersebut dijabarkan dalam beberapa kegiatan atau tahapan yaitu tahap Sosialisasi Kebijakan, Penertiban, Penataan dan Pembinaan.

Dalam tahap sosialisasi, beberapa PKL akhirnya memahami terhadap program kebijakan relokasi, dalam tahap penertiban memberikan hasil yang cukup memuaskan, hal ini nampak dari kerelaan PKL Kawasan Jalan Ki Hajar Dewantara untuk direlokasi ke belakang Kantor Kecamatan Jebres dengan tertib dalam tahap penataan juga berjalan lancar meskipun ada beberapa hambatan antara lain tempatnya kurang strategis dan di tempat yang baru saluran resapan air tidak baik, sehingga menyebabkan banjir. Sedangkan dalam tahap pembinaan, kegiatan pembinaan sudah mampu menyadarkan PKL untuk mematuhi aturan yang berlaku. Akan tetapi bantuan pinjaman lunak belum ada karena belum terbentuk koperasi.

Hasil dari kebijakan relokasi tersebut dikatakan efektif apabila dilihat dari indikator hasil yaitu pencapaian tujuan. Hal itu karena berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu menciptakan kawasan bebas PKL di sekitar Jalan Ki Hajar Dewantara dan

menciptakan pula kawasan asri terkait dengan pembangunan Solo Techno Park.

Jika dilihat dari indikator hasil yang lainnya, seperti efesiensi dan kepuasan kelompok sasaran, maka hasil dari kebijakan relokasi tersebut dapat dikatakan belum efektif. Hal itu karena tidak tercapai efesiensi ketika pembangunan kios yang membutuhkan banyak dana, tapi kios tidak dimanfaatkan dengan baik oleh para PKL. Selain itu juga masyarakat PKL kurang puas dengan kebijakan relokasi karena letak Pasar Panggungrejo yang kurang strategis, sehingga belum ramai akan pelanggan yang berakibat turunnya pendapatan PKL. Serta beberapa masalah bangunan seperti kondisi bangunan pasar yang kurang baik. Hal itu terlihat dari kios di bagian atas sering terdapat genangan air hujan karena tidak adanya saluran pembuangan air. Selain itu juga kondisi tangga yang juga tergenang air ketika hujan karena tidak ada kanopi.

Kebijakan relokasi PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara belum bisa memberikan solusi atau menyelesaikan masalah mengenai peningkatan kesejahteraan ekonomi para pedagang pasar. Hal itu karena kondisi pasar masih belum ramai pelanggan sehingga pendapatan PKL turun drastis.

2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan relokasi PKL yaitu dapat dilihat dari faktor sikap pelaksana, faktor komunikasi, faktor sumber daya, serta faktor kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran. Di mana efektivitas kebijakan relokasi PKL nampak ketika tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Hal ini berarti faktor-faktor tersebut berkaitan erat dengan usaha pencapaian tujuan.

Pada dasarnya beberapa faktor tersebut mendukung pencapaian tujuan (efektivitas kebijakan). Apabila dilihat dari faktor sikap pelaksana, dalam mencapai tujuan kebijakan relokasi yang telah ditetapkan, aparat pelaksana telah bersikap sebagaimana mestinya sesuai dengan mekanisme yang ada. Kemudian jika dilihat dari faktor

komunikasi, maka komunikasi sudah berjalan baik di kalangan antar instansi, hanya saja kendalanya yaitu komunikasi antara aparat dengan PKL yang kurang baik. Akan tetapi pada akhirnya PKL memiliki tingkat pemahaman dan kesadaran yang tinggi sehingga mau ditata. Lalu apabila dilihat dari faktor sumber daya, sejumlah pegawai dari Kantor

Pengelolaan PKL dan Satpol PP dikerahkan dalam pelaksanaan kebijakan relokasi PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara guna mencapai tujuan kebijakan relokasi PKL yaitu menciptakan kawasan bebas PKL di sekitar Jalan Ki Hajar Dewantara dan menciptakan kawasan yang asri sehubungan dengan dibangunnya Solo Techno Park. Namun demikian, mobilitas aparat pelaksana di lapangan kurang optimal, karena dalam melaksanakan tugasnya hanya menggunakan 1 buah mobil operasional. Kemudian apabila dilihat dari faktor kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran, maka masyarakat PKL sebagai kelompok sasaran nyatanya menunjukkan kepatuhan dan kesediaan direlokasi.

Dengan demikian nampak jelas bahwa beberapa faktor tersebut sangat berpengaruh dalam usaha pencapaian tujuan kebijakan relokasi PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara. Faktor sikap pelaksana, faktor komunikasi, faktor sumber daya, serta faktor kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran mendukung pencapaian tujuan, sehingga pada akhirnya tujuan kebijakan tercapai yaitu menciptakan kawasan bebas PKL di sekitar Jalan Ki Hajar Dewantara dan menciptakan kawasan yang asri sehubungan dengan dibangunnya Solo Techno Park.

M. Taufik Kurniawan (2015) Evaluasi Program Relokasi Pedagang Kaki Lima Dalam rangka Revitalisasi Banjir Kanal Barat (BKB) Kota Semarang dapat disimpulkan sebagai Berikut :

proses relokasi pedagang kaki lima melibatkan Pemkot Pemprov serta pihak Swasta selaku pihak yang mengerjakan proyek, kedua proses relokasi berjalan lancar tanpa adanya bentrokan karena

telah sesuai dengan kesepakatan bersama, dan yang terakhir ketiga setelah proses relokasi para pedagang mengeluh dengan tempat yang didapat karena sepi pengunjung dan tidak strategis alhasil mereka menjadi menganggur.

Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
Agata Ika Febrilianawati (2010)	Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki lima (PKL) di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta	<p>1.Mengetahui efektivitas kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta.</p> <p>2.Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi efektivitas kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta?</p>	Metode Survei	<p>1. Kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Ki Hajar Dewantara oleh Pemerintah Kota Surakarta ke Pasar Panggungrejo di belakang Kantor Kecamatan Jebres dapat dikatakan efektif karena berhasil dalam mencapai tujuan kebijakan relokasi PKL. Dimana tujuan relokasi PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara adalah menciptakan kawasan bebas PKL di sekitar Jalan Ki Hajar Dewantara serta menciptakan kawasan asri sehubungan dibangunnya Solo Techno Park.</p> <p>2. faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan relokasi PKL</p>

				yaitu dapat dilihat dari faktor sikap pelaksana, faktor komunikasi, faktor sumber daya, serta faktor kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran
M. Taufik Kurniawan (2015)	Evaluasi Program Relokasi Pedagang Kaki Lima Dalam rangka Revitalisasi Banjir Kanal Barat (BKB) Kota Semarang	1. Bagaimana proses relokasi pedagang kaki lima di bantaran Banjir Kanal Barat Kota Semarang ? 2. Faktor – faktor apakah yang menghambat dalam proses relokasi pedagang kaki lima bantaran Banjir Kanal Barat Kota Semarang	Metode Survei	1. proses relokasi pedagang kaki lima melibatkan Pemkot Pemprov serta pihak Swasta selaku pihak yang mengerjakan proyek, kedua proses relokasi berjalan lancar tanpa adanya bentrokan karena telah sesuai dengan kesepakatan bersama, dan yang terakhir ketiga setelah proses relokasi para pedagang mengeluh dengan tempat yang didapat karena sepi pengunjung dan tidak strategis alhasil mereka menjadi menganggur.

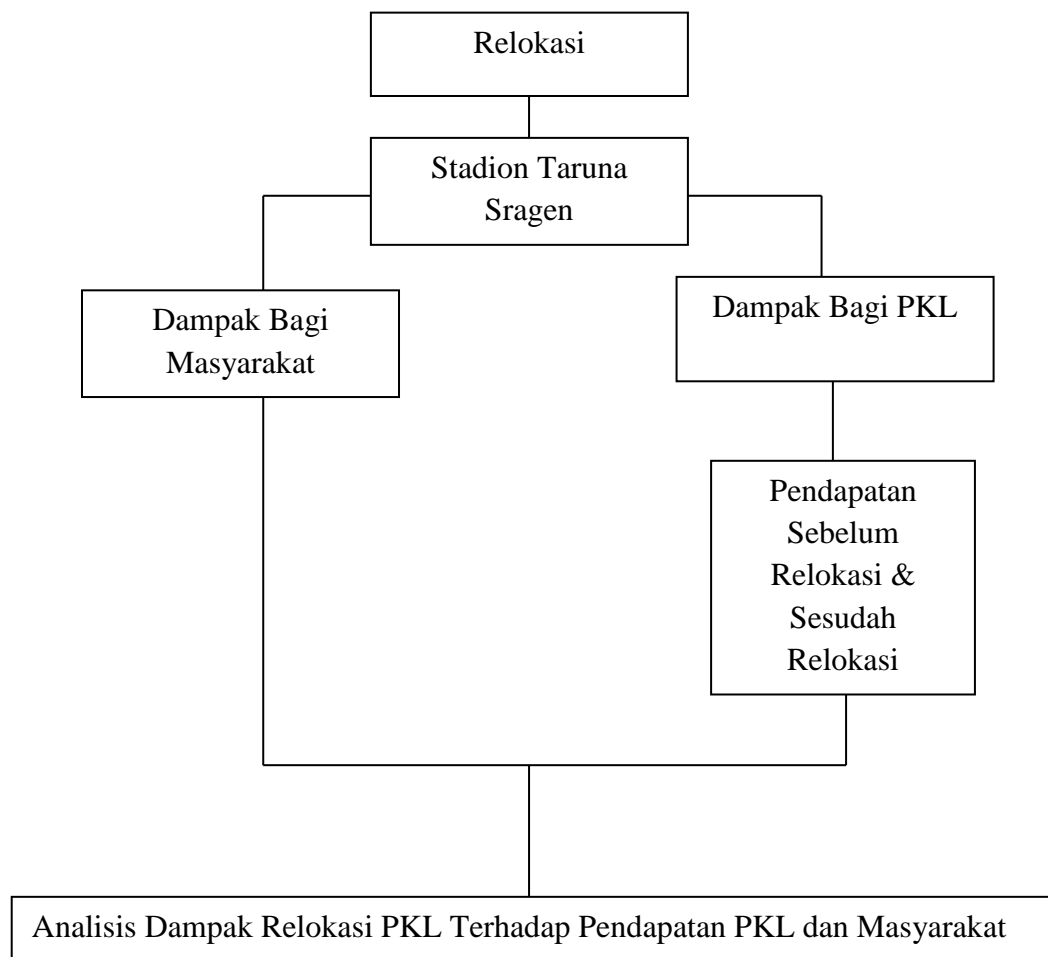
Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
Aji Perdana (2018)	Analisis Dampak Relokasi PKL dari Alun-alun Sragen ke Stadion Taruna Sragen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis Apa dampak relokasi pedagang kaki lima Alun-alun Sragen ke Stadion Taruna bagi pendapatan PKL? 2. Menganalisis dampak relokasi pedagang kaki lima Alun-alun Sragen ke Stadion Taruna bagi masyarakat sekitar Stadion Taruna ? 	Metode sensus dan survei	

1.6 Kerangka Penelitian

Pendapatan pedagang kaki lima ini dipengaruhi oleh tempat baru relokasi yaitu Stadion Taruna Sragen di mana letak Stadion Taruna ini berada di lingkungan wilayah yang padat dengan penduduk.

Dampak langsung yang diperoleh masyarakat yang ada di sekitar adalah semakin padatnya lingkungan yang mereka hal ini akan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat yang ada di sekitar Stadion Taruna.

Gambar 1.1 Kerangka Penelitian



Sumber : Peneliti, 2018

1.7 Batasan Operasional

Geografi adalah ilmu pengetahuan yang menceritakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam, dan penduduk serta mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. (Bintarto, 1977)

Relokasi merupakan usaha yang dilakukan untuk memindahkan suatu obyek dari suatu tempat ke tempat lain yang dianggap lebih baik. (Mustafa, 2008)

Pedagang kaki lima adalah orang-orang dengan modal relatif kecil/sedikit berusaha (produksi–penjualan barang–barang/jasa–jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu dalam masyarakat”. Usaha itu dilakukan pada tempat–tempat yang dianggap strategis dalam suasana informal (Eridian dalam Sudaryanti : 2000)

Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu (Suroto dalam hestanto, 2000)

Usaha adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tetap dan terus menerus agar mendapatkan keuntungan, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok yang berbentuk badan hukum maupun tidak yang didirikan dan berkedudukan disuatu tempat. (Hidayat, 1979)

Dampak adalah Akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik itu negatif atau positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu/sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu. (Santosa,2011)